

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA PEKANBARU**

(STUDI : DI BAZNAS KOTA PEKANBARU)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Syariah (S. Sy)**



RUSTAM NASUTION

NIM. 10821003699

PROGRAM S 1

JURUSAN AHWAL AL-SYAKH SHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2013

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru (Studi : di Baznas Kota Pekanbaru)

Zakat menurut bahasa dapat diartikan dengan suci, dan menurut istilah dapat diartikan memperbaiki dan menambah yakni menambah kebaikan dan berkah. Zakat menurut Undang-Undang No 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dengan tujuan niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah SWT dan mewujudkan keadilan dalam kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga rumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh Baznas Kota Pekanbaru, Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan zakat pada Baznas Kota Pekanbaru dan pendistribusian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Adapun lokasi penelitian pada Baznas Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman-Pekanbaru Komplek Masjid AR-Rahman dengan populasinya adalah seluruh pengurus Baznas Kota Pekanbaru yang berjumlah 50 orang dan Sampelnya adalah penulis mengambil 10% dari 50 orang pengurus, sehingga berjumlah 5 orang pengurus, maka teknik pengambilan sampel ini disebut *Purposive Sampling* .

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yakni teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data bersifat deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan ditemukan bahwa Baznas Kota Pekanbaru telah Menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mana Baznas telah melaksanakan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan dan melaksanakan laporan keuangan dengan baik.

Adapun faktor pendukungnya yakni masyarakat mayoritas muslim, mensosialisasikan peraturan zakat melalui masjid/ mushallah, dan dari zaman ke zaman semangat tinggi Pemerintah dalam mendorong Baznas, keputusan Pemerintah dan masyarakat untuk berzakat . Sedangkan faktor penghambatnya yakni respon masyarakat terhadap Baznas masih kurang dan sosialisasi belum optimal serta manajemen pengelola zakat masih bersifat tradisional. Adapun langkah-langkahnya yakni dengan menjalankan aturan-aturan yang telah dianjurkan dalam Islam yaitu mengingatkan apabila telah sampai waktu agar melaksanakan kewajiban membayar zakat dan meningkatkan kerja sama guna menyatukan persepsi antara Pemerintah dan masyarakat tentang pengelolaan zakat karena penguasa atau Baznas berhak meminta zakat untuk menjalankan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah dan akan senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini dengan judul: “PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA PEKANBARU (STUDI : DI BAZNAS KOTA PEKANBARU)”. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. yang senantiasa penulis rindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Skripsi ini ditulis dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana Strata-1 program studi Ahwal Al-Syakh syyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Khusus untuk Ayahanda tercinta syamsuddin dan Ibunda tercinta Arbiah selaku orang tua penulis yang selalu memberikan pengorbanan yang tak terhingga dengan sabar, tulus dan ikhlas dalam setiap do'a-nya yang dihaturkan kepada penulis. Tanpa ibu dan ayah semua ini akan sia-sia dan tidak bermakna apa-apa. Karena kalian adalah cahaya permata mutiara hati ananda

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Nazir Karim, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Akbarizan, MM. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta pembantu dekan I, II dan III yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam melakukan perkuliahan dan proses penelitian ini
4. Yang terhormat Bapak Yusran Sabili, MA selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu memberikan dorongan dan arahan-arahan kepada penulis
5. Yang terhormat Bapak H. Ismardi Ilyas MA yang selalu meluangkan waktu tanpa mengenal lelah dan capek untuk memberikan motivasi, bimbingan, semangat, menasehati kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis berterima kasih yang sedalam-dalamnya
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan/i Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
7. Yang terhormat Kepala Baznas serta Bapak dan Ibu pengurus Baznas Kota Pekanbaru yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian

8. Yang terhormat Pimpinan pustaka dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
9. Keluarga tercinta Kak Syariah, Kak Khodijah, Dik Nur Hidayah, Dik Maisyarah, dan Dik Ibnu Hibban yang selalu memberi dorongan, semangat dan senantiasa ikhlas mendoakan untuk menggapai cita-cita kepada penulis
10. Adinda Siti Fatimah yang selalu memberi motivasi dan do'a kepada penulis
11. Kepada pengurus masjid Ar-Ridwan yang telah menyediakan tempat tinggal dan bimbingan kepada penulis
12. Kepada sahabat penulis bang Ahmad Fauzi, Alsahri, Iin ismail, Ihsan, siswadi, Aswan, Rasyid, dan Kevin yang telah membagi inspirasi kepada penulis
13. Kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara pikiran, tenaga, maupun materil.

Penulis mendoakan semoga semua bantuan, dukungan, motivasi serta keihklasan do'a yang telah diberikan kepada penulis menjadikan amal ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Penulis, 07 Oktober 2013

RUSTAM NASUTION
NIM. 10821003699

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaannya	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT KOTA	
 PEKANBARU	14
A. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru	14
B. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru.....	14
C. Visi dan Misi	15
D. Susunan Pengurus Periode 2010 s/d 2013.....	15
E. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat	18
BAB III LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT DAN	
 PENGELOLAANNYA.....	24
A. Pengertian Dasar Hukum dan Hikmah Zakat	24
B. Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.....	34
C. Pengelolaan Zakat dan Permasalahannya	42

D. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	48
BAB IV ANALISI PENELITIAN	56
A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi: di Baznas Kota Pekanbaru)	56
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	71
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengeloaan Zakat Pada Baznas Kota Pekanbaru dan Pendistribusiannya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat menurut bahasa dapat diartikan dengan suci, dan menurut istilah berarti memperbaiki dan menambah yakni menambah kebaikan dan berkah. Zakat menurut istilah syara' ialah nama yang dikeluarkan dari harta atau sesuatu yang ditetapkan yang kemudian dijelaskan secara kongkrit.¹

Perkataan zakat berasal dari kata zaka',² artinya tumbuh dengan subur makna lain dari zaka' sebagaimana digunakan Al-Qur'an suci dari dosa.³ Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti ia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Ia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada didalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Sedangkan pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki.

¹ Muhammad Arsyad Al-Bysari, *Sabilal Muhtadin*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), cet.pertama h. 745

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989), cet. Ke-1 H.156

³ M.Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan wakaf*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), cet ke-1 h. 37

Dalam Al-Qur'an terdapat 32 kali kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata yang sinonim dengannya yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting .⁴

Zakat merupakan dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah sebagai dasar pendekatan antara jarak si miskin dengan sikaya, guna mewujudkan tanggung jawab dalam kemakmuran. Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan indikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Sebenarnya kemiskinan akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Persoalan yang nampak saat ini adalah sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁵

⁴ Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2001), cet ke-2 h. 43

⁵ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2003), cet ke-1 h. 170

Zakat tidak saja berdimensi ibadah dalam konteks menegakkan syariat Allah SWT, tetapi zakat juga bermakna sosial. Perintah ini sudah sangat jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Harta itu disebut zakat, karena ia membersihkan manusia dan mengeluarkannya dari dosa membuat hartanya berkah dan bertambah banyak. Sesudah mengeluarkan zakat, seseorang telah suci (*bersih*) diri dari penyakit kikir (*bakhil*) dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya. Sebagai landasan kewajiban mengeluarkan zakat, dijelaskan Allah dalam surah at-Taubah (9) : 103,

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ فِي سَعَتِهِ يُؤْخَذُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي جَمَعْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى تَابِئِهِمْ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَجِدُ فِيهِ مَغْلَبَةً
 أَوْ حِسَابًا لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُقَالُ لَكَ تِلْكَ آيَاتُنَا لَعَلَّكَ تَنْتَبِهْ
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى تَابِئِهِمْ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَجِدُ فِيهِ مَغْلَبَةً
 أَوْ حِسَابًا لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُقَالُ لَكَ تِلْكَ آيَاتُنَا لَعَلَّكَ تَنْتَبِهْ

Artinya ;

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mereka berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁶

Dari penjelasan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa amil zakat harus memungut harta zakat bagi orang-orang yang mampu mengeluarkannya. Bukan

⁶ Al-Qur'an dan Tterjemah, Departemen Agama RI (Semarang ; CV Asy-Syifa), cet ke-1 h. 297

hanya menunggu seperti yang banyak dilakukan oleh para amil pada masa sekarang ini.⁷

Dalam surah yang lainnya dijelaskan Allah dalam surah ar-Ruum (30) : 39,



“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.⁸

Berdasarkan keterangan ayat di atas, dapat diketahui bahwa dengan mengeluarkan zakat maka Allah SWT membalas orang yang mengeluarkan zakat tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) : 43,

⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya : CV Bina Iman, 2007), cet ke-2 h. 386

⁸ Al-Qur'an dan Tterjemah, Departemen Agama RI *op, cit*, h. 16



“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT mensejajarkan antara perintah shalat dan zakat. Jadi melaksanakan atau mendirikan shalat harus diiringi dengan menunaikan zakat. Selanjutnya, dalam upaya dalam optimalisasi pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 115 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 15 yang berbunyi :

1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota dibentuk Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/ Kota
2. Baznas Provinsi dibentuk oleh menteri atau usul Gubernur setelah dapat pertimbangan Baznas
3. Baznas Kabupaten/ Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/ Walikota setelah mendapat pertimbangan Baznas

Pasal 16

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/ Kota dapat membentuk Upz pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Upz pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Pasal 17

Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Laz.

Pasal 18

1. Pembentukan Laz wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit.
 - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
 - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
 - c. Mendapat rekomendasi dari Baznas.
 - d. Memiliki pengawas syariat.
 - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
 - f. Bersifat nirlaba.
 - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.

h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁹

Kemudian Keputusan Menteri Agama Nomor 115 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 Ayat 9 menerangkan bahwa “Unit Pengumpul Zakat” yang selanjutnya disingkat Upz adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 6 menerangkan bahwa Upz dibentuk dengan keputusan ketua badan pelaksana Baz sesuai dengan tingkatnya. Ayat 8 menerangkan bahwa “Unit Pengumpulan Zakat” melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diunit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan hasil disetorkan kepada bagian pengumpulan Badan pelaksana Baz, karena Upz tidak bertugas mendayagunakannya.¹⁰

Menurut keterangan Akbarizan bahwa banyaknya Upz di Pekanbaru yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Seperti Pasal 1 Ayat 9, Pasal 18 Ayat 1, dan pasal 10, padahal salah satu tugas Upz adalah menyerahkan hasil pengumpulan zakat ke Baznas, kemudian Beliau menambahkan bahwa sulitnya mengumpulkan laporan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat oleh Upz walau sudah beberapa kali dikirim surat sehingga kesuliatan dalam melaksanakan koordinasi karena tidak ada laporan tersebut dan koordinasi itu pula sangat

⁹ Anggota Ikapi, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung : Fokusmedia, 2012), cet ke-1 h. 8-9

¹⁰ *Ibid*

diharapkan oleh Baznas Kota Pekanbaru, agar pelaksanaan dapat diterapkan Undang-Undang yang telah ditentukan.¹¹

Seharusnya dalam jangka waktu sekarang keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah menunjukkan kemajuan, paling tidak ada karya nyata bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sudah efektif dalam pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru. Namun berdasarkan pengamatan penulis di Kota Pekanbaru pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hingga kini belum terlaksana dengan baik. Pengelolaan zakat belum terpadu, kurang koordinasi dan komunikasi antara Badan Amil Zakat belum terjalin komunikasi yang baik sebagaimana mestinya, penjangkauan kemiskinan kurang diperhatikan, sementara dari pihak fakir miskin sendiri dalam menggunakan zakat yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya misalnya kepada sesuatu yang produktif.

Melihat realisasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan tentang pengelolaan zakat Kota Pekanbaru dalam menerapkan Undang-Undang, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul :

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA PEKANBARU (STUDI :
DI BAZNAS KOTA PEKANBARU)**

B. Batasan Masalah

¹¹ Akbarizan Ketua Baznas Kota Pekanbaru, *wawancara*, Pekanbaru 17 desember 2012

Melihat terlalu luasnya penelitian ini, maka untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yakni “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru (Studi : di Baznas Kota Pekanbaru)” yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman – Pekanbaru Komplek Masjid AR-Rahman.

C. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti sesuai dari latar belakang, maka masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh Baznas Kota Pekanbaru
- b) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru
- c) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan zakat pada Baznas Kota Pekanbaru dan pendistribusian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh Baznas Kota Pekanbaru
- b) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Kota Pekanbaru
- c) Untuk mengetahui pengelolaan Zakat pada Baznas Kota Pekanbaru dan pendistribusiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dan mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1), di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada Jurusan Ahwal Alsyahsiyah
- b) Sebagai sumbangan pemikiran, masukan dan pengabdian masyarakat khususnya dalam hal pengelolaan Zakat, menghubungkan kordinasi antara pemerintah dengan masyarakat yang meningkatkan hasil dan daya guna Zakat untuk mengetahui kemiskinan masyarakat.
- c) Sebagai bahan masukan bagi Baznas Kota Pekanbaru dan Pemerintah tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Pekan

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan memilih lokasi penelitian pada Baznas Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman-Pekanbaru Komplek Masjid AR-Rahman.¹²

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengurus Baznas kota Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi¹³ adalah seluruh pengurus BAZNAS kota Pekanbaru yang berjumlah 39 orang.¹⁴ Sampelnya adalah penulis mengambil 15% dari 50 orang pengurus, sehingga berjumlah 5 orang pengurus, maka teknik pengambilan sampel ini disebut *purposive sampling*.¹⁵

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu yang diperoleh langsung dari Baznas Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan respon yang ada kaitannya, dokumen dan arsip yang berkaitan erat dengan

¹² Observasi, 17 Desember 2012

¹³ Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, jadi penelitian populasi adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan semua subyek penelitian sebagai sumber data. Lihat Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru : Zanaf Publishing, 2011), cet pertama h. 55

¹⁴ Dokumentasi, 29 April 2013

¹⁵ Purposive Sampling dikenal juga dengan sampling pertimbangan ialah teknik sampling yang digunakan peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Lihat Riduan, *Dasar-dasar Statistik*, (Bandung : Alfabeta, 2010), cet pertama h. 20

masalah yang diteliti, berbentuk buku daftar, serta dilaksanakan penelaah-an terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung kelapangan, untuk melihat dan mengamati objek dan subjek penelitian.
- b. Interview atau Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara kepada pihak pengurus Baznas Kota Pekanbaru
- c. Dokumentasi yaitu penulis mencari data melalui dokumen yang terditemukan dalam arsip dengan mengumpulkan hasil-hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh Baznas Kota Pekanbaru dan dokumen foto-foto kegiatannya.

6. Analisa Data

Setelah semua data yang diperlukan berhasil terkumpul, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Analisa deduktif, penulis melakukan penganalisaan data atau fenomena yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Analisa induktif, penulis melakukan penganalisaan atau fenomena yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistem yang diatur sedemikian rupa agar mengarah pada pembahasan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan bab gambaran umum Badan Amil Zakat kota Pekanbaru, yaitu terdiri dari sejarah berdirinya Badan Amil Zakat kota Pekanbaru, visi dan misi Badan Amil Zakat kota Pekanbaru, Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru, Program dan kegiatan Badan Amil Zakat kota Pekanbaru.
- BAB III : Merupakan bab tinjauan teoretis tentang zakat dan pengelolaannya terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat dan hikmah zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakat, pengelolaan zakat, dan permasalahannya, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

BAB IV : Merupakan bab terdiri dari pembahasan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, langkah-langkah menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan zakat pada Baznas Kota Pekanbaru dan pendistribusiannya berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Berdiri Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat yang dikukuhkan Pemerintah Kota Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 2001.¹ Pengelolanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 KMA 373 tahun 2003, Perdirjen D/291 Tahun 2001 dan Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 hal ini menunjukkan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kepengurusan Baznas Kota Pekanbaru saat ini merupakan ketetapan Walikota melalui SK Nomor 140 Tahun 2011 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru Priode 2010 s.d 2013.

B. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
3. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
4. Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat

¹ Dokumentasi Baznas Kota Pekanbaru, 2011

C. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam Ad/ Art Baz melalaui SK BAZ Nomor 9 Tahun 2011 yaitu:

Visi : Mewujudkan Badan Amil Zakat yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau tahun 2013

Misi : 1) Memberdayakan zakat infak dan sadaqah umat

2) Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi *muzakki mustahik* dan pemerintah

3) Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat

4) Melahirkan *mustahik* yang berjiwa *enterpreunership*

5) Menyadarkan masyarakat sadar zakat.²

D. Susunan Pengurus Periode 2010 s/d 2013

a. Dewan Pertimbangan

Ketua : Wakil Walikota

Wakil Ketua : Kemenag Kota Pekanbaru

Sekretaris : Ass. Sosial Ekonomi Pembangunan

W.Sekretaris : Kabag Sosial

Anggota : 1. Ass. Pemerintah

2. Kabag Hukum

² *Ibid*

b. Dewan Pengawas

Ketua	: Ketua MUI Kota
Wakil ketua	: KA. Pengadilan Agama
Sekretaris	: KA. Bawasko Kota
W. Sekretaris	: Kakan Pelayanan Pajak Kota
Anggota	: 1. Kakan Kesbag Kota 2. Kadis Sosial dan Pemakaman Kota

c. Badan Pelaksana

Ketua	: Setda Kota Pekanbaru
Wakil ketua 1	: DR.H. Akbarizan, MA. M.Pd
Wakil ketua II	: H. Erman Ghani, MA
Sekretaris	: Haryati, SE. M.E.Sy. Ak
W.Sekretaris I	: Drs. Zamzami Domo
W.Sekretaris II	: Zulkarnain, MA
Bendahara	: Wan Nurhawati
W. bendahara I	: H. Zulkifli, S.Ag
W. bendahara II	: Sabariyah, M.Sy. ³

d. Bidang Pengumpulan

Ketua	: Drs. Muh. Nur Anan Domo
Anggota	: Fadhillah Darma, ST
Anggota	: H. Syafril siregar, MA
Anggota	: Midiawati, S.Hi

³ *Ibid*

Anggota : H. Dasrizal, SE, M.Si.

e. Bidang Pendistribusian

Ketua : H. Ismardi Ilyas, M. Ag

Anggota : Drs. H. Dahlan Jamil, MA

Anggota : H. Zulkifli, MA

Anggota : Ahmad Fakhri

Anggota : H. Hasyim, S.Pd.i, MA

f. Bidang Pendayagunaan

Ketua : H. Anwar Sumun

Anggota : Devi Megiwati, ME.Sy

Anggota : Mohd. Binnawafil, S.Hi

Anggota : Yudi Irwan, ME.Sy

g. Bidang Pengembangan

Ketua : Drs. Husni Tamrin, M.Si

Anggota : Marabona, ME.Sy

Anggota : H.Khairunnas, Sy

Anggota : H. M. Jarir, MA.⁴

⁴ *Ibid*

E. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat

1. Tugas pokok.

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6 dan 7 tugas pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (BAZ Kota Pekanbaru ke Walikota Pekanbaru dan Ketua DPRD Kota Pekanbaru).

2. Fungsi dan tugas

Masing-masing satuan pada kepengurusan Badan Amil Zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Dewan pertimbangan

Fungsi : Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas:

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama dewan pengawas dan badan pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat

3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan dewan pengawas.
4. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.⁵

b. Dewan Pengawas

Fungsi : Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.

Tugas :

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
5. Menunjuk akuntan publik.

c. Badan Pelaksana

Fungsi : Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Tugas :

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

⁵ *Ibid*

2. Melaksanakan operasional dan pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 3. Menyusun laporan tahunan.
 4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan perwakilan rakyat sesuai tingkatannya.
 5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun ke luar.
- d. Tugas Bidang-Bidang Pada Badan Pelaksana
1. Bidang Pengumpulan
 - a. Membuat brosur dan baleho zakat.
 - b. Mengadakan sosialisasi dan pembentukan Upz pada dinas/instansi dan pembinaan-pembinaan terhadap Upz yang sudah terbentuk.
 2. Bidang Pendistribusian
 - a. Melakukan pendataan *mustahik* dan berkoordinasi dengan Upz.
 - b. Menetapkan jadwal pendistribusian.
 - c. Menetapkan skala pendistribusian dan jumlah besaran yang didistribusikan.⁶
 3. Bidang Pendayagunaan
 - a. Menyalurkan zakat bersifat bantuan pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahik* baik secara perorangan maupun kelompok melalui program yang berkesinambungan.

⁶ *Ibid*

- b. Menyusun dan menetapkan prosedur program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- c. Memprioritaskan *mustahik* yang akan berusaha dan berpeluang menguntungkan.
- d. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon *mustahik* yang akan mendapatkan zakat untuk usaha produktif.

4. Bidang Pengembangan

- a. Membuat Nomor pokok wajib zakat
- b. Mengeluarkan NIA (Nomor Induk Amil)
- c. Mengolah database *mustahik dan muzakki*
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada *mustahik dan muzakki*
- e. Melakukan penelitian dan kajian tentang zakat baik yang berhubungan dengan *mustahik dan muzakki*
- f. Melakukan pembinaan terhadap amil, *mustahik dan muzakki*
- g. Mengembangkan potensi ekonomi *mustahik*
- h. Mengadakan *muzakarah*, seminar, dan pelatihan tentang zakat.
- i. Menerbitkan media informasi tentang zakat seperti brosur, bulletin, majalah dan lain-lain
- j. Pengembangan aplikasi bersama (SIZT) Sistem Informasi Zakat Terpadu.⁷

⁷ *Ibid*

3. Program Unggulan Badan Amil Zakat

Di samping Tupoksi, masih perlu dilakukan program-program lain yang bertujuan untuk membantu sesama umat serta mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh yang harus direalisasikan oleh Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Program ekanbaru Makmur. Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian *mustahik* dan diharapkan untuk menjadi *muzakki*. Antara lain dengan didirikan kampung binaan, pelatihan wirausaha dan pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah dan sebagainya.
- b. Program Pekanbaru Cerdas. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya, seperti pemberian beasiswa dari tingkat dasar sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana), yaitu memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang membutuhkan, bekerjasama dengan perguruan tinggi, mendirikan rumah pintar / taman bacaan, mobil pintar dan sebagainya.
- c. Program Pekanbaru Sehat, program ini ditujukan memberikan pengobatan secara umum-umum untuk *dhu'afa* dan *masakin*. Seperti mendirikan rumah sehat di halaman masjid-masjid. Mengoptimalkan setiap hari mobil kesehatan lengkap dengan obat dan tim dokternya bekerjasama dengan dinas kesehatan dan PMI Kota Pekanbaru.
- d. Program Pekanbaru Takwa. Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat, melalui

pengembangan dan pengiriman da'i ke daerah yang membutuhkan, dengan bekerjasama dengan ormas-ormas Islam, serta kaderisasi para ulama muda.

- e. Program Pekanbaru Peduli. Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah yang sering terjadi di Kota dan tempat-tempat lainnya. Program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁸

⁸ *Ibid*

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHANDAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA

A. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat membawa banyak problema. Salah satunya ialah status kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Prokontrapun muncul mengenai pengelolaan zakat secara nasional, Undang-Undang yang baru diterbitkan itu mengatur pengelolaan zakat agar ditata secara nasional. BAZNAS dalam hal ini sebagai badan milik negara menjadi lembaga yang berwenang mengelola sedangkan LAZ hanya sebagai supporting dalam peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, kedua lembaga zakat tersebut memiliki peran yang sama dan sejajar. Ketua Umum BAZNAS, Didin Hafidhuddin mengatakan, pasca lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2011, perlu adanya konsolidasi kelembagaan zakat secara nasional. "Konsolidasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menyamakan visi dan persepsi tentang pengelolaan zakat nasional, sehingga semua stakeholder, dalam hal ini Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat mengambil peran yang tepat dan efektif", Undang-Undang tersebut dihadirkan untuk menata perzakatan ke arah yang lebih baik.¹

¹ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-Nusantara/12/04/17/m2mmny-uu-zakat-untuk-menata-perzakatan-yang-lebih-baik>

B. Isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Adapun isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dapat penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum
4. Sedekah adalah harta maupun nonharta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional

8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum
12. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi
7. Akuntabilitas

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Pasal 4

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
 - b. Uang dan surat berharga lainnya
 - c. Perniagaan
 - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
 - e. Peternakan dan perikanan
 - f. Pertambangan
 - g. Perindustrian
 - h. Pendapatan dan jasa
 - i. *Rikaz*.
3. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha
4. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS
2. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara
3. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
 - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

1. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota
2. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam
4. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat
5. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 10

1. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri
2. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak mulia
- e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak menjadi anggota partai politik

- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia
- b. Habis masa jabatan
- c. Mengundurkan diri
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus
- e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 14

- 1. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat
- 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
2. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS
3. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS
4. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS
5. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing

Pasal 16

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

1. Pembentukan laz wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
 - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
 - c. Mendapat rekomendasi dari baznas
 - d. Memiliki pengawas syariat
 - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
 - f. Bersifat nirlaba
 - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
 - h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 21

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak

Pasal 23

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki
2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Pasal 27

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Bagian Keempat

Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

1. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi
3. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 29

1. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala
2. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala

3. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala
4. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala
5. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil

Pasal 31

1. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil
2. Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional

Pasal 33

1. Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ
2. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ
 - b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ
 - b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.²

² Undang-Undang Zakat, Lopcit

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi : di Baznas Kota Pekanbaru)

1. Perencanaan Baznas

Menurut undang-undang tentang pengelolaan zakat yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat meliputi pasal 16 yang menyatakan bahwa : pasal 16 *Pertama*, hasil pengumpulan zakat didayagunakan *mustahik* sesuai dengan ketentuan agama. *Kedua*, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. *Ketiga*, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) diatur dengan keputusan menteri.

Dalam pelaksanaan undang-undang zakat nomor 38 pasal 16 ini, badan amil zakat dituntut untuk selektif dan benar-benar teliti dalam menentukan kepada siapa (mustahik) zakat itu didistribusikan dan model zakat seperti apa yang akan didayakan kepada *mustahik* zakat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta diharapkan dana zakat tersebut tepat sasaran, tepat guna dan daya.

2. Pelaksanaan Baznas

Pelaksanaan tugas dan kegiatan di Baznas Kota Pekanbaru berdasarkan pembukuan zakat atau akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account*, yang artinya menghitung. Secara teknis akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklafikasian (*classifying*), peringkasan (*summarizing*), trnsaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya. Dalam pengertian tersebut termasuk proses perhitungan. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan dan memberikan gambaran kepada para pemakai tentang kinerja usaha, posisi keuangan, dan arus sebuah organisasi dalam periode tertentu.¹ Adapun laporan-laporan Baznas Kota Pekanbaru, yakni sebagai berikut.

- a. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, yang meliputi menerima surat-surat masuk, mengagendakan, membalas atau menindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan keperluan.

TABEL I

DATA PERSURATAN TAHUN 2011

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Banyaknya surat masuk		
	a. Surat biasa	37	
	b. Undangan	9	
2	Banyaknya surat keluar		
	a. Surat biasa	84	
	b. Undangan	13	
3	Banyaknya SK		
	a. SK UPZ	12	
	b. SK Hasil rapat	1	
	c. SK Pegawai	2	
	d. SK Tunjangan Pengurus aktif	1	

¹ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2003), cet ke-1 h. 11-12

b. Menerima dana zakat, infak, dan sedekah dari para muzakki, munfiq, atau mishaddiq baik secara perorangan maupun UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Dinas/ Badan/ Instansi dan Madrasah di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru melalui setor langsung ke sekretariat, dan melalui rekening Bank Baz yakni dengan nomor :

- 1) 107-20-00391 (Bank Riau Cabang Pasar Pusat).
- 2) 2002226136 & 2002226160 (Bank Mega Syari'ah).
- 3) 141111811670001 (Bank PD. BPR Sarimadu).²

Pelaksanaan tugas ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam Pasal 28 ayat 1 bahwa selain menerima zakat, Baznas atau Laz juga dapat menerima infak, sadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya.³

Akan tetapi menurut penulis penerimaan tersebut harus memiliki dokumen pribadi,⁴ karena dalam Pasal 28 Ayat 3 menerangkan lagi bahwa pengelolaan infak, sadaqah, dan dana sosial lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.⁵

a. Mengadakan survey lokasi calon mustahik yang telah memasukkan berkas berupa fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga ke sekretariat Baz maupun rekomendasi muzakki dan pengurus Tim survey turun melalui surat tugas dari

² Dokumentasi, Baznas Kota Pekanbaru, 2011

³ Anggota Ikapi, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung : Fokusmedia, 2012), cet ke-1 h. 11

⁴ Observasi, 17 Juli 2013

⁵ *Op Cit*, h. 12

Ketua Baz. Selain itu tim survey harus mengisi berita acara survey dengan melengkapi dan mengisi data-data di dalamnya.

- b. Optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah melalui kegiatan sosialisasi ke Dinas/ Badan/ Instansi dan Madrasah pada tingkat Kota Pekanbaru.

TABEL II
KEGIATAN SOSIALISASI

No	Nama Instansi	Tanggal	Ket
1	Badan ketahanan pangan dan pelayanan penyuluh pertanian	3 Oktober 2011	Surat Tugas N BAZ-PKU/SPT/XI/01/2011
2	Badan penanaman modal dan promosi	4 Oktober 2011	Surat Tugas N BAZ-PKU/SPT/XI/02/2011
3	Dinas pertanian	10 Oktober 2011	Surat Tugas N BAZ-PKU/SPT/XI/03/2011
4	Dinas koperasi UMKM	27 Oktober 2011	Surat Tugas N BAZ-PKU/SPT/XI/04/2011
5	Dinas Pasar	8 November 2011	Surat Tugas No. BAZ-PKU/SPT/XI/05/2011

- c. Rapat rutin dan pertemuan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait

TABEL III
JADWAL RAPAT DAN PERTEMUAN KOORDINASI

No	Tanggal	Kegiatan	Ket
1	5 Mei 2011	Rapat Pengurus	Rutin
2	6 Juni 2011	Rapat Pengurus	Rutin
3	7 Juli 2011	Rapat Pengurus	Rutin
4	14 Juli 2011	Rapat Pengurus	Rutin
5	12 Agustus 2011	Rapat Pengurus	Rutin
6	14 Oktober 2011	Rapat Pengurus	Rutin
7	2 Desember 2011	Rapat Pengurus	Rutin
8	8 Desember 2011	Rapat Koordinasi	Di Ka. KUA dan Camat
9	22 Desember 2011	Rapat Pengurus	Rutin

- d. Kegiatan-kegiatan penting lainnya, untuk menambah kemampuan pengetahuan pengurus.

TABEL IV

KEGIATAN SEMINAR DAN SILATURAHMI

No	Tanggal	Kegiatan	Ket
1	23 Agustus 2011	Seminar daeah New Spirit for Amil BAZ & UPZ se Kota Pekanbaru	Kerjasama dengan Kemenag Kota Pekanbaru
2	Desember 2011	Silaturahmi ke BAZ Kab. Kampar	

- e. Mengikuti Rakor Baz se Propinsi Riau pada tanggal 29 s.d 31 November 2011 di hotel Sri Indrayani Jl. Samratulangi Pekanbaru yang diikuti oleh kepala sekretariat Devi Megawati. ME. Sy berdasarkan surat tugas No. BAZ/ PKU/ SPT/ X/ 06/ 2011 yang telah ditetapkan
- f. Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan pembaharuan pengurus Upz dengan mengeluarkan SK pengangkatan pengurus Upz sebanyak 11 kali.

TABEL V

PEMBENTUKAN UPZ DAN PEMBAHARUAN PENGURUS UPZ

No	Tanggal	Judul Tentang Pengangkatan
1	18 Agustus	pengurus UPZ Dinas Tenaga Kerja
2	18 Agustus	Pengurus upz mtsn bukit raya
3	18 Agustus	Pengurus UPZ Badan Kesbang. Politik dan Perlindungan Masyaakat
4	18 Agustus	Pengangkatan pengurus UPZ Badan Penanaman Modal dan Promosi
5	25 Agustus	Pengangkatan pengurus UPZ Dinas Pertanian

6	05 September	Pengangkatan pengurus UPZ Inspektorat Kota Pekanbaru
7	05 September	Pengangkatan pengurus UPZ Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Petanian
8	30 September	Pengangkatan pengurus UPZ Kantor Pertahanan
9	18 Oktober	Pengangkatan pengurus UPZ Dinas Koperasi dan UMKM
10	21 Oktober	Pengangkatan pengurus UPZ Dinas Pasar
11	31 Oktober	Pengangkatan pengurus UPZ Sekretariat DPRD

- g. Mencetak Kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) kepada Muzakki Upz dan Muzakki perorangan yakni masing-masing berjumlah 25 Kartu Upz dan kartu muzakki perorangan.
- h. Mengajukan rancangan Perda (Peraturan Daerah) tentang zakat kepada biro hukum kantor Walikota Pekanbaru, namu ditarik kembali karena telah keluar Undang-Undang Zakat terbaru yakni Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang memiliki perubahan yang cukup signifikan dengan Undang-Undang lama yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dijadikan dasar dalam rancangan Perda.
- a) Mengajukan rancangan Perwako (Peraturan Walikota) tentang Zakat.
- b) Membuat publikasi melalui media online yakni sebuah blog dengan alamat baz.pekanbaru@blogspot.com yang berisi tentang kegiatan dan pelaporan keuangan Baznas Kota Pekanbaru.⁶

Menurut penulis Pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat di Baznas Kota pekanbaru telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pegelolaan zakat dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 1 dan 2 bahwa:

⁶ Dokumentasi, Baznas Kota pekanbaru 2011

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/ Kota dapat membentuk Upz pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Upz pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Baznas provinsi dan Baznas Kabupaten/ Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁷

3. Pengendalian dan Pertanggung Jawaban Baznas

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum merujuk pada PSAK Akutansi Zakat Nomor 109 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 28 dan Pasal 29.

Dasar pengukuran laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (historical cost) dan laporan keuangan masih disusun berdasarkan metode Cash Basis (pengakuan penerimaan dan pengeluaran pada saat Kas di terima atau dikeluarkan). Adapun pengakuan penilaian dan penyajian adalah sebagai berikut.

- 1) Penerimaan dana zakat, infak, shadaqah, dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima
- 2) Pengeluaran dana zakat, infak, shadaqah, dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima

⁷ Anggota Ikapi, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung : Fokusmedia, 2012), cet ke-1 h. 8-9

- 3) Pengakuan dana zakat, infak, shadaqah, dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima

4. Laporan Keuangan Baznas

a) Pos Neraca

1) Pos Aktiva

Aktiva Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru Tahun 2011 terdiri dari :

a. Asset Lancar

Asset lancar Badan Amil Zakat pada Tahun 2011 terdiri dari :

1. Kas On Hand

Cash On Hand adalah kas tunai merupakan sejumlah asset lancar yang ada pada Bendahara per tanggal neraca (31 Desember 2011) yaitu sebesar Rp. 11.626.862

2. Cash On Bank

Cash On Bank adalah Kas di Bank merupakan sejumlah asset lancar yang ada pada Bank rekanan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru per tanggal neraca (31 Desember 2011) yaitu sebesar Rp. 121.244.122

b. Asset Tidak Lancar

Asset tidak lancar Badan Amil Zakat pada Tahun 2011 terdiri dari peralatan-peralatan merupakan sejumlah asset yang diterima dari pengurus lama kepada pengurus baru tanggal 1 Juni 2011 dan dilakukan estimasi nilai peralatan dengan total sebesar Rp. 30.130.000 dengan nilai penyusutan sebesar

Rp. 15.904.000. Sedangkan jumlah peralatan baru yang dibeli selama tahun 2011 bernilai sebesar Rp. 6.150.000, antara lain terdiri dari :

- (a) Pembelian 1 unit PC dan 2 Unit monitor seharga Rp. 4.100.000
- (b) Pembelian camera seharga seharga Rp. 1.450.000
- (c) Pemblian Modem dan HP seharga Rp. 600.000

2) Per Pos Passiva

- 1) Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban lancar terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan hutang lancar, sedangkan kewajiban jangka panjang terdiri dari imbalan kerja jangka panjang. Untuk tahun 2011 nilai kewajiban adalah Rp. 0,- atau (nol rupaiah) atau tidak ada kewajiban pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru

- 2) Saldo Dana adalah jumlah dana zakat, infak, sadaqah, dana amil dan non halal yang jumlahnya sebesar Rp. 139.020.984, dengan rincian :

- a) Saldo dana sebesar Rp. 97.382.827
- b) Saldo dana infak sadaqah sebesar Rp. 25.857.671
- c) Saldo dana Amil sebesar Rp. 15.639.223
- d) Saldo dana non halal sebesar Rp. 891.264

- 3) Donasi adalah nilai penyeimbang dari sejumlah asset yang diterima dari pengurus lama kepada pengurus baru Badan Amil Zakat periode 2010-2013 nilai asset setelah dikurangi penyusutan sebesar Rp. 14.226.000

b) Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat

a. Pos Sumber Dana

1) Penerima Dana Zakat

Jumlah penerimaan dana zakat tahun 2011 sebesar Rp. 152.820.575

terdiri dari :

1. Muzakki Perusahaan/ Upz merupakan dana zakat yang diambil dari gaji pegawai oleh pengelola Upz atau menyetorkan langsung melalui Upz Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru. Jumlah penerimaannya adalah sebesar Rp. 122.684.075

TABEL VI

DAFTAR PENERIMA ZAKAT UPZ /PERUSAHAAN

TANGGAL	NAMA UPZ	KAS DBET	SALDO
01/03/2011	UPZ Disnker	537.000	
04/04/2011	UPZ Disnker	537.000	
02/05/2011	UPZ Disnker	537.000	
01/06/2011	UPZ Disnker	537.000	
06/06/2011	UPZ SETKO	15.966.048	
01/07/2011	UPZ Disnker	537.000	
27/07/2011	UPZ KEMENAG	27.000.000	
01/08/2011	UPZ Disnker	537.000	
03/08/2011	UPZ SETKO	2.412.031	
26/08/2011	UPZ SETKO	1.205.013	
26/08/2011	UPZ Disnker	537.000	
06/09/2011	UPZ Badan Promosi	1.379.000	
03/10/2011	UPZ SETKO	1.205.013	
03/10/2011	UPZ Disnker	537.000	
10/10/2011	UPZ Badan Promosi	1.306.000	
01/11/2011	UPZ SETKO	1.382.138	
01/11/2011	UPZ Disnker	537.000	
07/11/2011	UPZ Badan Promosi	1.046.00	
01/12/2011	UPZ SETKO	1.382.138	
01/12/2011	UPZ Disnker	537.000	
07/12/2011	UPZ Badan Promosi	1.455.000	
19/09/2011	Disektor Zakat kemenag bulan juliagustus direkening infak transaksi 8/8	17.200.286	
21/09/2011	Zakat UPZ Kemenag bulan September	7.845.8000	

31/10/2011	Zakat UPZ Kemenag bulan oktober	6.620.220	
11/11/2011	Zakat UPZ Dinas Pertanian	2.576.000	
23/11/2011	Zakat UPZ Kemenag bulan November	6.590.057	
14/12/2011	Zakat UPZ MAN 1	10.875.000	
19/12/2011	Zakat UPZ Kemenag bulan Desember	6.692.331	
16/12/2011	Zakat UPZ Dinas Pertanian	2.456.000	
	JUMLAH	122.684.075	

TABEL VII

REKAPITULSI PENERIMAAN ZAKAT DARI UPZ TAHUN 2011

NAMA UPZ	KAS DEBET	SALDO
UPZ Disnker	5.370.000	
UPZ Badan promosi dan penanaman modal	5.546.000	
UPZ kementrian agama kota pekanbaru	72.308.694	
UPZ dinas prtanian	5.032.000	
UPZ Ibu Juminar	23.552.381	
UPZ MAN 1	10.875.000	
JUMLAH	122.684.075	

2. Muzakki perseorangan merupakan dana zakat yang disetor muzakki atau dijemput petugas langsung kerumah muzakki. Jumlah penerimaannya adalah sebesar Rp. 30.136.500

2) Penerimaan Dana Infak Sadaqah

Jumlah penerimaan dana infak sadaqah tahun 2011 sebesar Rp. 45.744.917 terdiri dari :

- a) Infak sadaqah terikat merupakan dana infak yang diserahkan donator kepada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru. Jumlah penerimaannya adalah sebesar Rp. 0

- b) Infak sadaqah terikat merupakan dana infak yang diserahkan donator kepada Badan Amil Zakat dapat menggunakan dana untuk kegiatan sosial lainnya selain 8 asnaf jumlah penerimaannya adalah sebesar Rp. 45.744.917

TABEL VIII

DAFTAR PENERIMAAN INFAK UPZ / PERUSAHAAN

TANGGAL	URAIAN	KAS DEBET	SALDO
16/12/2011	Infak UPZ Dinas pertanian	365.000	
31/12/2011	Infak UPZ Dinas pertanian	365.000	
08/08/2011	Buka rekening dengn dana zakat dan Infak UPZ kemenag bulan Juli-Agustus	13.251.714	
25/08/2011	Infak Hamba Allah	42.500	
21/09/2011	Infak UPZ kemenag bulan septembe	7.431.800	
11/11/2011	Infak UPZ Dinas Pertanian	365.000	
29/11/2011	Infak UPZ kemenag Oktober Novembr	16.123.953	
19/12/2011	Infak UPZ kemenag Oktober Desember	7.799.950	
	JUMLAH	45.744.917	

3) Penerimaan Dana Amil

Jumlah dana amil tahun 2011 adalah sebesar Rp. 66.268.723 terdiri dari :

- a) Bagian Amil dari dana zakat merupakan persentase dana zakat yang alokasikan untuk membiayai SDM Badan Amil Zakat dan operasional lainnya selain biaya kegiatan pengurus persentase yang diambil adalah 5% untuk zakat yang bersumber dari UPZ dan 12,5% untuk zakat yang bersumber dari muzakki perseorangan. Untuk tahun 2011 dana ini hanya digunakan untuk menggaji Amil fulltimer sebanyak 1 (orang). Dana yang dialokasikan untuk amil ini sebesar Rp. 9.901.267.

- b) Bagian Amil dari dana infak sadaqah merupakan persentase dana infak yang dialokasikan untuk membiayai SDM Badan Amil Zakat dan operasional lainnya selain biayai kegiatan pengurus. Persentase yang diambil adalah 5% untuk infak yang bersumber dari UPZ dan 12,5% untuk infak yang bersumber dari perseorangan. Dana yang dialokasikan untuk amil ini sebesar Rp. 2.287.246.
- c) Penerimaan dana Operasional APBD merupakan dana yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru. Pada tahun 2011 jumlah dana yang diterima adalah sebesar Rp. 50.000.000.
- d) Penerimaan dana lainnya merupakan penerimaan yang bersumber dari bantuan-bantuan pihak lain sehubungan dengan adanya kegiatan pada Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru. Untuk tahun 2011 sumber dana ini berasal dari sharing dana kegiatan dengan Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebesar Rp. 3.027.500, bantuan dari RS Awal Bros sebesar Rp. 500.000, dan penerimaan bonus/ bagi hasil Bank Syariah sebesar Rp. 552.710. Sehingga total penerimaan dana lainnya pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 4.080.210.
- 4) Penerimaan Dana Non Halal merupakan penerimaan dana yang bersumber dari bunga dan jasa giro Bank Konvensional. Untuk tahun 2011 jumlahnya sebesar Rp. 1.301.887.

b. Per Pos Penggunaan Dana

- 1) Pengumpulan Dana Zakat, jumlah penggunaan dana zakat tahun 2011 adalah sebesar Rp. 115.880.000 terdiri dari :
 - a) Penyaluran dana Kosumtif merupakan bentuk penyaluran kepada mustahik bersifat insidentil dikarenakan kebutuhan mendesak misalnya untuk bantuan orang terlantar (ibnu sabil) jumlah penyaluran untuk program ini adalah sebesar Rp. 80.330.000
 - b) Penyaluran bantuan produktif merupakan bentuk penyaluran kepada mustahik dengan meningkatkan ekonomi melalui bantuan usaha produktif. Jumlah penyaluran dana untuk program ini adalah sebesar Rp. 9.800.000
 - c) Penyaluran anak asuh/ Pekanbaru cerdas merupakan bentuk penyaluran dengan tujuan membantu pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Jumlah penyaluran dana untuk Program ini adalah sebesar Rp. 25.000.000
- 2) Penggunaan Dana Infak Sadaqah, jumlah penggunaan dana infak sadaqah adalah sebesar Rp. 17.600.000
- 3) Penggunaan Dana Amil merupakan penggunaan dana untuk kegiatan operasional, biaya kegiatan pengurus, biaya SDM, dan lain-lain. Jumlah biaya untuk kegiatan pengurus adalah sebesar Rp. 18.400.000, dana untuk menggaji amil adalah sebesar Rp. 9.720.000, dan biaya operasional lainnya sebesar Rp. 22.509.000

4) Penggunaan dana non halal digunakan untuk pembiayaan yang bersifat umum atau untuk membayar administrasi dan pajak tabungan ada Bank. Untuk tahun 2011 pembayaran pajak tabungan sebesar Rp. 370.623, sedangkan biaya administrasi Bank sebesar Rp. 40.000.⁸

Menurut Ismardi pelaksanaan kegiatan Baznas dengan metode yang efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang tertib dan teratur ataupun fungsi manajemen yang baik dimana pelaksanaan tugas mengelola zakat adalah untuk mentaati ajaran Islam dan mematuhi Undang-Undang zakat,⁹ sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁰

Menurut penulis pelaksanaan tugas oleh Baznas Kota Pekanbaru telah berjalan dengan baik.¹¹ dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 7 Ayat 2 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Akan tetapi sebaiknya dana non halal tidak digunakan karena dana non halal bagian dari riba, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al-Imran (3) : 130

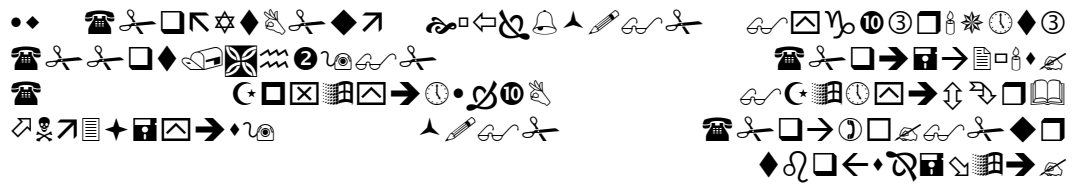
⁸ Dokumentasi Baznas Kota Pekanbaru Tahun 2011

⁹ Wawancara pengurus Baznas Kota Pekanbaru, 22 April 2012

¹⁰ Anggota Ikapi, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung : Fokusmedia, 2012), cet ke-1 h. 4

¹¹ Observasi, 17 Juli 2013

¹² *Op cit*, h. 5



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

1. Faktor Pendukung

Dari pengamatan penulis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adapun faktor pendukung dalam hal ini, diantaranya :

- a. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.
- b. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan Baznas Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi dengan keterlibatan Pemerintah Kota, hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan dana operasional kepada pengurus Baznas Kota Pekanbaru yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini walaupun masih belum memenuhi semua kebutuhan Baznas itu sendiri.

- c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus Baznas Kota Pekanbaru juga merupakan faktor pendukung yang kuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap *muzakki* maupun *mustahik* zakat.
- d. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan Baznas Kota Pekanbaru yang strategis yakni di kompleks Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru menjadikan informasi mengenai zakat lebih akurat dan mudah disampaikan kepada siapapun terutama kepada *muzakki* dan *mustahik* zakat. Di samping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam menetapkan *mustahik* zakat

2. Faktor Penghambat

Dari pengamatan penulis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, adapun faktor penghambat dalam hal ini, diantaranya :

- a. Situasi politik Kota Pekanbaru, perpolitikan Kota Pekanbaru sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, karena setiap pergantian kepala Pemerintah Kota maka pengurus Baznas harus melakukan pendekatan kembali untuk menetapkan kebijakan baru, artinya kebijakan yang telah disepakati sebelumnya akan terhapus dengan sendirinya seiring dengan pergantian kepala daerah atau Pemerintah Kota.

- b. Dana operasional yang minim, walaupun beberapa tahun terakhir ini pemerintah kota meningkatkan jumlah dana operasional Baznas Kota tapi itu belum mampu untuk memenuhi seluruh dana operasional Baznas Kota Pekanbaru, sehingga Baznas harus berhemat-hemat dalam menggunakan anggaran dana dan kas yang ada.
- c. Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada *mustahik*.
- d. Sosialisasi undang-undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya undang-undang zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat, karena undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan memberikan keyakinan kepada *muzakki*. Namun sosialisasi yang belum mengena kepada target dan sasaran zakat maka menjadikan undang-undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.

3. Langkah-Langkah Untuk Menyelesaikan Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Setelah melaksanakan penelitian di lapangan, menurut hemat penulis, salah satu upaya untuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini pada pengelola zakat oleh UPZ adalah meningkatkan kerja sama guna menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Masyarakat membentuk organisasi yang mengkoordinasi seluruh Upz yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu sebab tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawab Upz dalam Undang-Undang tersebut adalah tidak adanya kesepahaman bersama tentang metode dalam pengelolaan zakat termasuk didalamnya tidak satu pendapat dalam menerima dan memahami tugas dan tanggung jawab Upz dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat tersebut. Hal ini berdampak pada kesenjangan dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Oleh karena itu masyarakat perlu membentuk organisasi koordinasi Upz di Kota Pekanbaru. Tujuannya ialah bagaimana antara masjid yang satu dengan masjid yang lain dapat berkoordinasi dengan daerah pengumpulan dan penyaluran zakat.

Menurut pengamat penulis, hampir semua masjid mempunyai jamaah tetap, untuk itu dalam pengelolaan *database*, upaya pengumpulan dan penyaluran zakat sudah seharusnya dibuat aturan koordinasi khusus antara

satu masjid dengan masjid lainnya.¹³ Akbarizan menambahkan bahwa di Indonesia ada Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai organisasi pembinaan profesi pengelola masjid. Kemudian beliau menambahkan bahwa di Kota Pekanbaru sebelumnya sudah ada wacana untuk membuat forum seperti itu. Waktu itu dalam pengelolaan dana infak anak yatim yang ada di masjid-masjid, namun belum sempat terlaksana karena kurangnya tenaga yang mau mengelola.¹⁴

Adanya wadah ini akan mempermudah dan dipandang efektif dalam upaya efektifitas sosialisasi peraturan pengelolaan zakat, dan sosialisasi yang diberikan akan lebih mudah untuk ditindak lanjuti. Selama ini yang menjadi kendala tidak satu persepsinya bahkan menjadi saingan antara masjid yang satu dengan masjid tetangganya. Menurut penulis tidak terlaksananya wacana ini selain karena tenaga juga tidak adanya koordinasi dengan pemerintah, sehingga terkesan pengelolaan coba-coba, wadah ini tidak ada pengukuhan yang jelas.

2. Membentuk jaringan kerja sama Baznas, Laz dan Upz yang ada, cakupan wilayah kerja Baznas biasanya sangat terbatas, disamping jumlah anggotanya yang kurang ditambah dengan alokasi dana yang terbatas, artinya budget akan sangat terkuras bila harus menjaring daerah-daerah pelosok yang justru menurut perhatian lebih. Oleh karena itu untuk kasus di Kota Pekanbaru, Baznas harus kembali menghubungi pengelola Upz setempat untuk membuat jaringan kerja sama.

¹³ Observasi, 29 April 2013

¹⁴ Wawancara ketua Baznas Kota Pekanbaru, 17 Mei 2013

Selanjutnya Baznas mengeluarkan surat keputusan pembentukan Upz dengan komposisi pengurus yang diusulkan oleh pengurus masjid setempat. Hal ini dikarenakan posisi sentral pengelolaan zakat adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpul umat Islam dalam beribadah. Masjid seharusnya bukan hanya tempat ibadah ritual saja tetapi juga ibadah sosial. Bagaimana memakmurkan masjid yang berdampak kepada kemakmuran bagi jamaah sekitarnya.

3. Sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan, selama ini sosialisasi peraturan pengelolaan zakat dengan dibentuk wadah komunikasi Baznas se-Kota Pekanbaru, sekecamatan, sekelurahan, dan seterusnya, ini dimanfaatkan untuk sosialisasi perundang-undangan zakat
4. Kelemahan Undang-Undang zakat, menunjukkan Undang-Undang ini harus di Amandemen atau dipertegas dalam petunjuk pelaksanaannya dilapangan. Untuk itu pentingnya ada Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat.

Menurut penulis Undang-Undang zakat yang telah berjalan lebih kurang 14 Tahun. Selain dari pada itu perlu segera ada Peraturan Daerah zakat. Semestinya persoalan zakat bukan hanya persoalan departemen agama tetapi juga pemerintah daerah guna optimalisasi pengelolaan zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan penelitian ini adalah :

- a. Secara garis besar langkah-langkah Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat diawali dengan registrasi calon *mustahik* setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Baznas Kota Pekanbaru, kemudian pengurus Baznas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon *mustahik* untuk didisposisikan ke ketua harian Baznas agar ditindaklanjuti oleh ketua pendayagunaan. Setelah itu tim survey diturunkan untuk memastikan kebenaran data dan studi kelayakan calon *mustahik* dengan berkoordinasi melalui Ketua RT/ RW dan Ketua Masjid setempat. Setelah pembuktian data calon *mustahik* pengurus baznas melakukan pleno/ musyawarah penetapan kriteria *mustahik* zakat sebelum didistribusikan kepada *mustahik* zakat.
- b. Proses dan langkah-langkah di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap subsistem/ komponen-komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang teratur dan sistematis sehingga satu bagian tidak dapat terpisahkan dengan bagian lainnya. Dengan demikian sistem yang diterapkan Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat adalah sistem penentuan terstruktur atau sistem penentuan kriteria *mustahik* bersifat terstruktur dan tersistematis.

- c. Faktor pendukung sistem Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat meliputi keberadaan undang-undang tentang pengelolaan zakat, dukungan pemerintah, pengurus yang memiliki pengalaman dan lokasi Baznas Kota Pekanbaru yang berada di pusat kota. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya meliputi kondisi perpolitikan Kota Pekanbaru, dana operasional yang tidak memadai, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat terlebih berzakat lewat lembaga tersebut, serta informasi mengenai undang-undang zakat yang belum sampai dan tidak tepat sasaran.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Baznas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepada Baznas Kota Pekanbaru hendaknya meluahkan waktu yang lebih banyak kepada badan amil zakat serta memberikan ide-ide pembaharuan dalam pelaksanaan zakat.
- b. Kepada Baznas Kota Pekanbaru agar dapat melakukan pendataan yang lebih kongkrit tentang keberadaan *mustahik* zakat di seluruh pelosok daerah Pekanbaru.
- c. Kepada Baznas Kota Pekanbaru hendaknya menyediakan formulir bantuan dana zakat di tempat-tempat yang terjangkau oleh *mustahik*.

- d. Kepada pengurus Baznas hendaknya bisa memberikan bantuan pemikiran kepada *mustahik* yang akan mendapatkan bantuan zakat, supaya mereka mampu memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya serta mampu mengelola dana yang mereka dapatkan dari harta zakat (zakat produktif).
- e. Kepada semua masyarakat muslim hendaknya menyalurkan zakatnya kepada pengurus badan amil zakat untuk dikelola dan diberdayakan, sehingga zakat tersebut tersalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qordhowi, Yusuf, *Ibadah dalam Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Al-Bani, Nashiruddin, *Terjemahan Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Abdurrahman Al-Jazari, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2002)
- Ahmat Sunarto, *Hadits Shahih Bukhori*, (Jakarta: Annur Press, 2005)
- Abdul Al Hamid Mahmud Al Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Fiqh* (Jakarta Timur: Kencana, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2005)
- Gysfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema insani, 2002)
- Hasan, M. Ali *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Ansuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2003)
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak* (Jakarta kencana, 2008)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta : PT. Bulan Binang 1991)
- ____Hasbi Ash-Shiddieqyy, *Pedoman Zakat* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009)
- H.A.Hamid Usman dan Hj. Harkah A. Jalil Ahmad, *Menghiting Zakat 2,5%* (Jakarta : yayasan Wakaf Al-Manar, 2002)
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011)
- <http://www.imz.or.id>, *Permasalahan Zakat di Indonesia*
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV Bina Iman, 2007)

- Muryadi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003)
- M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawan Fiqih*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
- M. daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988)
- Nuruddin mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Riskal* (PT. Raja Grafindo Persada)
- Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji, 2004)
- Rifa'I dkk, *Tarjemahan Kifaratul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Bandung : PT Alma'arif, 1978)
- ___ Sabiq, Sayyid *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Fundi Aksara, 2008)
- Syekh Muhammad Arsyad Al-Bysari, *Sabilal Muhtadin* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005)
- Wahbah Al Zuhaily, *Zakat, Kajian Berbagai Mahzab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997)
- Zaisi, Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 2003)